



# OPDINI KEMENDIDIKAN 2007

## UJIAN NASIONAL

pe  
sio  
KES  
keras  
ggaran  
h pener  
ndidikan,  
penerimaan  
uru, prestasi s  
swa baru, ujian na  
n dalam pendidikan,  
n dikampus, sistem pener  
ndidikan, sertifikasi guru, presta  
an nasional, tenaga kependidikan, angga  
pendidikan, penerimaan BAN  
sertifikasi guru, prestasi siswa, kekerasa  
tenaga kependidikan, anggaran pendidikan, se  
ndidikan, penerimaan siswa baru, ujian nasiona  
pus, sistim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH,  
penerimaan siswa baru, kekerasan dalam pendidikan, penerimaan s  
asi guru, UJIAN NASIONAL, sistim penerimaan siswa baru, kekeras  
, sertifikasi guru, prestasi siswa, KEKERASAN DIKAMPUS, siste  
rimaan siswa baru, TENAGA KEPENDIDIKAN, anggaran pendidikan  
n dalam pendidikan, penerimaan siswa baru, ujian nasional, tenaga

Direktorat  
dayaan  
8



310.9598  
UPI  
P

# Ujian Nasional

## Editor:

Bambang Wasito Adi  
Yusmawardi  
M.Q. Wisnu Aji  
Setiono  
Haryani  
Dian Srinursih  
Subiyanto  
A. Chaedar Alwasilah  
A. Buchori  
Illa Kartila



# **Opini Pendidikan 2007**

## **Ujian Nasional**

Diterbitkan oleh :  
**Pusat Informasi dan Humas**  
**Departemen Pendidikan Nasional**

Edisi pertama, Desember 2007

ISBN : 978-979-15617-3-0 (jilid lengkap)  
ISBN : 978-979-15617-8-5 (jilid 5)

*Sekretariat :*  
Yuswan Rosepi  
Zainuddin  
Tini Setiawati  
Bayu Pratama

*Desain Grafis :*  
Vina Adriani

# Kata Pengantar Editor

*"The editor doesn't make the news...  
but he does interpret it and shape it,  
as the conductor does... Above all,  
he selects what's going to be  
on the program, which is one hell of a power".*  
– Hedley Donovan

**K**umpulan tajuk ini merupakan memori kolektif dari bagian perjalanan pembangunan ihwal pendidikan nasional, khususnya dalam rentang 2006-2007. Editorial adalah opini cerdas, kritis, visioner, dan reflektif dari sebuah media massa. Setiap hari lazimnya tiap media menurunkan tajuk yang berbeda, namun sering ditemukan isu yang sama walau dimuat pada hari yang berbeda diwacanakan sama kritisnya oleh beberapa media. Dengan kata lain, walaupun tajuk itu menyajikan sudut pandang subjektif, secara keseluruhan media massa menghadirkan sejumlah intersubjektivitas. Intersubjektivitas demikian itu boleh saja dianggap sebagai kesimpulan handal saat itu. Media massa adalah potret kehidupan sebuah bangsa, dan tajuk ihwal pendidikan adalah menggambarkan potret pendidikan bangsa itu!

Pendidikan adalah persoalan besar bagi bangsa dimana pun di muka bumi ini. Karena itu persoalan pendidikan seyogianya menjadi kepedulian semua pihak. Buku ini menghimpun sejumlah tajuk yang kami seleksi dari berbagai media cetak yang sampai ke Pusat Informasi dan Humas Depdiknas. Tajuk-tajuk itu pada umumnya masih mencuatkan isu-isu klasik, yaitu seputar pendidikan secara umum (7 naskah), guru (7 naskah), kurikulum (4 naskah), perbukuan (5 naskah), anggaran pendidikan (9 naskah), ujian nasional (11 naskah), prestasi (4 naskah), pendidikan tinggi (6 naskah), dan kekerasan dalam pendidikan (6 naskah).

Di luar dugaan kami pada tahun 2006-2007 isu kekerasan sangat menonjol dalam pemberitaan di media massa sehingga menjadi tajuk berita pada sejumlah media cetak terkemuka nasional. Itulah sebabnya

kami merasa perlu mengelompokkannya dalam kategori khusus. Kami mengajak semua pihak untuk introspeksi, “Mengapa dalam dunia pendidikan masih ada kekerasan?” Isu kedua dan ketiga yang paling banyak diwacanakan adalah masih sekitar ujian nasional dan anggaran pendidikan. Artinya dua isu ini masih tetap mengganjal dan merupakan pekerjaan rumah kita bersama yang perlu segera diselesaikan bersama.

Kami berharap bahwa buku ini akan menjadi rujukan semua pihak, khususnya para pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan. Buku ini tak pelak lagi sebagai dokumen perjalanan sejarah pembangunan pendidikan di tanah air pada tahun 2007 yang perlu dicermati untuk merancang kebijakan pendidikan di masa-masa mendatang.

Jakarta, Desember 2007

Editor

# Pengantar

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Buku serial '**Opini Pendidikan 2007**' merupakan kali pertama diterbitkan oleh Pusat Informasi dan Humas Depdiknas, dengan tujuan untuk mendokumentasikan berbagai opini yang menyoroti masalah pendidikan yang pernah dimuat oleh berbagai media massa selama kurun 2006-2007.

Opini tentang isu pendidikan yang ditulis dalam editorial sebuah media massa, boleh jadi bukan sekedar pemikiran atau pendapat editor dari media massa yang bersangkutan, tetapi juga merupakan rangkuman pendapat yang mencerminkan wacana publik yang sedang berkembang tentang sebuah isu pendidikan.

Bagi Depdiknas, berbagai pendapat serta pemikiran tentang berbagai isu pendidikan yang disalurkan melalui tulisan di media massa dalam sebuah Tajuk atau Editorial, adalah sebuah bentuk perhatian dan kepedulian media massa terhadap pendidikan yang sungguh patut untuk disimak dan dicermati karena tentu akan memberikan wacana yang semakin luas terhadap masalah pendidikan, yang pada gilirannya tentu akan lebih mendorong terciptanya keterbukaan dalam penyusunan berbagai kebijakan tentang pendidikan nasional.

Karena alasan tersebut, Pusat Informasi dan Humas Depdiknas berinisiatif untuk mendokumentasikan Tujuk atau Editorial tentang berbagai isu pendidikan yang pernah dimuat oleh media massa pada tahun 2006-2007. Selama tahun 2006-2007, tidak kurang dari 191 naskah Tajuk atau Editorial tentang pendidikan pernah dimuat oleh media massa pusat maupun daerah, dengan nada dan arah tulisan yang berbagai macam pula, yaitu mulai dari yang bernada konstruktif mendukung sebuah kebijakan pendidikan, memberi saran, memperingatkan, mengkritisi atau bahkan mengkritik, dan sebagainya.

Agar lebih mudah di ikuti dan enak dibaca, '**Opini Pendidikan 2007**'

disusun dalam serial dengan mengelompokkan per isu pendidikan, seperti misalnya isu Ujian Nasional, isu Guru, isu anggaran pendidikan, isu kurikulum dan perbukuan, dan lain-lain.

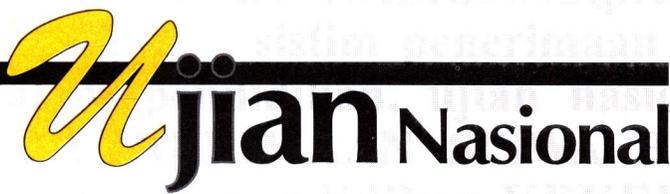
Kami berharap buku '**Opini Pendidikan 2007**' ini dapat dijadikan bahan rujukan dan referensi bagi para pemangku kepentingan pendidikan mulai dari para pendidik, pakar pendidikan, pemerhati pendidikan, dan kalangan birokrasi pendidikan, yang pada akhirnya tentu dapat memperluas khasanah dan wawasan masyarakat luas dalam upaya kita untuk memberikan sumbangan yang terbaik bagi pembangunan pendidikan nasional.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jakarta, Desember 2007

Kepala Pusat Informasi dan Humas  
Departemen Pendidikan Nasional

**Bambang Wasito Adi**



# Ujian Nasional

# Ujian Nasional Masih Diperlukan

Suara Pembaruan, 21 April 2007

**S**ontak, puluhan siswa SMA Negeri 2 Tanggul, Jember, Jawa Timur melempari gedung SMA Negeri 1 Tanggul yang lokasinya berdekatan. Mereka marah karena Sri Andayani, guru SMA Negeri 1 yang mengawasi Ujian Nasional (UN) hari terakhir di sekolahnya, kelewat ketat. Kaca-kaca jendela gedung sekolah pecah. Bahkan mereka pun memukuli ibu guru yang dianggap "merugikan" mereka.

Masih di Jawa Timur, Kepala Sekolah sebuah SMK ditangkap karena dituduh mencuri soal UN. Di Padang, Sumatera Barat, puluhan peserta UN melaporkan guru yang memberi bocoran jawaban soal ke polisi. Itulah beberapa gambaran pelaksanaan kecurangan UN 2007 yang berakhir Kamis (19/4) lalu. Contoh di atas sebenarnya tidak terlalu mengagetkan mengingat tahun lalu kejadian serupa juga banyak terjadi. Apalagi, pelaku-pelaku kecurangan UN tahun sebelumnya banyak yang tidak ditindak.

Begitu parahkah moral pelajar kita sehingga guru yang seharusnya mereka hormati, malah menjadi tempat pelampiasan kekesalan mereka? Kita tidak bisa gegabah menjawabnya. Kejadian itu tidak bisa dilihat secara parsial. Tentu ada pemicu yang membuat mereka bertindak nekat seperti itu. Selain soal yang dianggap sulit, tuntutan kelulusan dirasa terlalu memberatkan. Mereka melampiaskan kekesalan mereka kepada orang yang dapat membangkitkan sedikit emosi saat siswa berada pada puncak stres. Kalau sudah begitu kejadiannya, lantas apakah UN masih dianggap perlu?

Sejak awal, UN telah menimbulkan pro dan kontra. Mereka yang tidak setuju beranggapan bahwa tidak adil kelulusan siswa ditentukan hanya oleh tiga mata pelajaran yang diujikan di UN. Mereka yang mempunyai nilai baik untuk mata pelajaran lain, tetapi nilai UN-nya di bawah standar, dianggap tidak lulus. Di sini jelas bahwa peran pemerintah pusat begitu dominan. Tidak seharusnya pemerintah pusat mengurus kelulusan siswa, tetapi berkonsentrasi pada peningkatan kualitas guru dan fasilitas sekolah.

Di pihak lain mereka yang setuju berharap UN terus dilanjutkan. Bahkan

standarnya dinaikkan dari tahun ke tahun. Wakil Presiden Jusuf Kalla saat meninjau pelaksanaan UN mengatakan bahwa UN tetap diperlukan. Meski di sana-sini ada kecurangan, jumlahnya tidak banyak. Ia yakin, tingkat kelulusan UN kali ini bisa mencapai 92 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mendekati 90 persen. Bahkan Mendiknas Bambang Sudibyo mengatakan, standar UN dari tahun ke tahun harus ditingkatkan. Ia berharap, standar UN bisa meingkat menjadi 6,0 pada 2009 mendatang.

Tidak dapat dimungkiri, tujuan UN sangatlah mulia. Pemerintah ingin pendidikan di Indonesia punya standar secara nasional. Beberapa negara maju juga menerapkan ujian secara nasional untuk standardisasi mutu pendidikan nasionalnya. George Herbert Walker Bush (Ayah George W. Bush, presiden AS saat ini) dalam *statement* politiknya sesaat setelah dilantik menjadi presiden mengatakan, semua anak AS harus unggul dalam bidang sains dan matematika. Oleh karena itu, siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 harus mengikuti ujian negara.

Dan yang perlu digarisbawahi, UN bukan satu-satunya syarat yang harus dipenuhi siswa bisa lulus sekolah. Selain UN, siswa harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Kemudian lulus ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dan yang terakhir, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.\*\*\*

15/10/2006

BATALKAN  
"!"



"BIASANYA  
WAKIL KITA  
KALAH"

"ARGUMENTASINYA  
LEMAH"



Sinar Harapan, 4 Oktober 2006

# Berharap Pada UN

Suara Pembaruan, 17 April 2007

**H**ari Selasa (17/4) hingga Kamis (19/4), para pelajar kelas tiga SLTA mengikuti Ujian Nasional (UN). Satu tugas akhir yang akan menentukan apakah mereka lulus atau gagal setelah tiga tahun menekuni atau menimba ilmu di bangku sekolah.

Data Badan Standar Nasional Pendidikan, UN tingkat SMA/MA/SMK/SMA-LB akan diikuti 2.075.800 siswa di seluruh Indonesia. Mereka sudah barang tentu sekuat daya berusaha sukses menuntaskan proses belajar mereka. Apalagi, jika mereka gagal UN pada tahun ini maka mau tak mau harus mengulanginya pada tahun depan.

Memang akan ada ujian kesetaraan bagi mereka yang gagal. Tapi, seperti yang terjadi tahun-tahun sebelumnya, jadwal ujian kesetaraan sudah melampaui batas waktu penerimaan mahasiswa baru. Sehingga walaupun mengikuti ujian kesetaraan, mereka yang akhirnya lulus tetap menunggu tahun berikutnya untuk mengikuti tes masuk perguruan tinggi.

Berbicara pendidikan nasional harus diakui bahwa masih terdapat kelemahan di sana-sini. Contoh paling aktual adalah UN itu sendiri. Dari sisi siswa dan orangtua siswa, jelas tidak ingin mengulang atau kembali ikut ujian kesetaraan. Mereka pasti hanya ingin sekali ikut UN dan setelah lulus bisa memperoleh ijazah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

Yang membuat mereka cemas, pelaksanaan UN yang di bawah kendali langsung pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, standar nilai kelulusan dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. Pertanyaannya, patokan standar kelulusan itu bagaimana? Apakah pemerintah berpatokan pada kualitas sekolah di Jakarta atau kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Sebab bila dari situ patokannya, mereka yang berada di daerah-daerah yang serba kekurangan sudah barang tentu sudah dihindangi kekhawatiran bakal kesulitan menghadapinya.

Agak mirip dengan harapan para siswa dan orangtua siswa, pihak sekolah pun berupaya agar seluruh anak didiknya berhasil lulus dalam UN. Upaya ini sudah barang tentu berkaitan dengan citra sekolah dan para pengajar. Oleh karena itu, beberapa minggu sebelum UN, banyak sekolah di berbagai daerah melaksanakan ujicoba. Dari hasil ujicoba itu diperoleh gambaran bahwa banyak hal yang harus diperbaiki, sehingga para siswa mau tak mau harus belajar lebih keras lagi.

Semua harapan itu, baik para siswa, orangtua siswa, para guru dan sekolah, juga menjadi impian pemerintah. Pemerintah di sini, tidak hanya Departemen Pendidikan Nasional mewakili pemerintah di pusat, tapi juga pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Kita sangat mendukung keinginan pemerintah yang juga ingin memperbaiki mutu pendidikan, salah satunya dengan meningkatkan, dari tahun ke tahun, standar nilai kelulusan UN. Tapi upaya itu hendaknya pula tidak dilakukan dengan kesan semena-mena, yang justru akan membuat niat itu tidak tercapai. Apalagi masyarakat malah merasa dirugikan dengan langkah yang sejatinya mulia itu. Sebab kita tahu, sejak teks UN itu dicetak hingga dibagikan ke semua sekolah diawasi secara ketat. Begitu pula dalam pelaksanaannya, para guru pengawas ditugasi untuk mengawasi di sekolah bukan tempat mereka mengajar. Peluang kolusi atau kebocoran sebisa mungkin ditekan.

Supaya kecurigaan itu bisa dihilangkan, kita berharap ke depan pemerintah lebih serius dalam menangani masalah pendidikan. Setidaknya rencana akan membuat pendidikan semakin murah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat bukan sekadar janji politik.

Selamat menempuh UN bagi seluruh pelajar SLTA. Semoga berhasil.\*\*\*

# UN Dimulai Hari Ini

Pikiran Rakyat, 17 April 2007

**M**enjalani proses belajarmengajar tiga mata pelajaran tersebut memang "pahit" dan sulit. Namun, jika upaya ini sukses, di masa depan kelak bangsa Indonesia dapat memetik hasilnya yang manis.

SISWA kelas XII sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliah (MA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK), Selasa (17/4) ini, melaksanakan ujian nasional (UN) tahun pelajaran 2006/2007 sampai dengan Kamis (19/4). Sementara siswa kelas IX sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiah (MTs) melaksanakan UN Selasa (24/4) sampai dengan Kamis (26/4).

Keputusan penyelenggaraan UN 2007 ini sempat mendapatkan protes dari berbagai pihak. Mereka menganggap sistem UN tidak cukup adil. Pemrotes mempertanyakan mengapa kelulusan siswa hanya ditentukan oleh tiga hari ujian, padahal mereka selama setahun penuh belajar? Mengapa yang diujikan hanya tiga mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris? Mengapa hanya tiga mata pelajaran itu yang menentukan kelulusan siswa? Mengapa standar kelulusan mesti dinaikkan menjadi 5,00? Dan sebagainya.

Meski demikian, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) bersikukuh tetap melaksanakannya. Bahkan, Mendiknas Prof. Dr. Bambang Sudibyo berobsesi meningkatkan lagi standar kelulusan dari rata-rata 5,00 menjadi 6,00. Alasannya, nilai rata-rata 5,00 sesungguhnya masih , di bawah standar pendidikan yang baik. Di masa lalu, nilai rata-rata 5,00 sesungguhnya masih di bawah standar. Dalam rapor, nilai di bawah 5,5 masih berwarna merah yang menandakan seseorang belum dianggap lulus. Angka di atas 5,6 baru berwarna biru atau hitam dan dinyatakan lulus.

Menilik tiga mata pelajaran yang diujikan matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris sesungguhnya merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki setiap siswa sekolah menengah sebagai bekal kelak setelah

lulus, baik saat memasuki dunia kerja maupun meneruskan sekolah yang lebih tinggi. Matematika dimaksudkan untuk melatih logika anak, bahasa Indonesia mengajarkan tentang *nation character building*, sedangkan bahasa Inggris berkaitan dengan proyeksi masa depan bangsa yang hampir merebut dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebagian besar tertulis dalam teks bahasa Inggris.

Itulah sebabnya wajar jika tiga mata pelajaran tersebut menjadi wajib untuk dikuasai para siswa. Menjalani proses belajar-mengajar tiga mata pelajaran tersebut memang "pahit" dan sulit. Namun, jika upaya ini sukses, di masa depan kelak bangsa Indonesia dapat memetik hasilnya yang manis, yakni demi masa depan bangsa yang berpikir logis, memiliki kepribadian yang matang, dan menguasai iptek.

Keputusan mengujikan tiga mata pelajaran sesungguhnya hanya persoalan standar minimal. Ujian Sekolah (US) pada gilirannya boleh mewajibkan mata pelajaran lain untuk lulus sebagai pelajaran wajib. Namun agar siswa lebih mendalam dalam belajar, sekolah sebaiknya tidak membebani siswa dengan terlalu banyak mata pelajaran yang jumlahnya mencapai 18 mata pelajaran.

Sudah saatnya sekolah dan Dinas Pendidikan memikirkan agar siswa lebih berkonsentrasi pada spesialisasi mata pelajaran tertentu, namun dipelajari secara mendalam. Berbagai mata pelajaran yang sangat beragam dan bersifat titipan bisa dicakup dalam satu mata pelajaran tertentu. Jumlah mata pelajaran mestinya tidak lebih dari 10 sehingga memungkinkan siswa belajar lebih konsentrasi.\*\*\*

# Selamat Menempuh UN

Poskota, 17 April 2007

Hari ini secara serentak, sekurangnya 2.075.800 murid kelas 3 SMU/MA/SMK di seluruh Indonesia mengikuti ujian nasional (UN). Terlepas dari pro kontra penyelenggaraan UN, pemerintah tetap bersikukuh menggunakan nilai hasil UN sebagai standar kelulusan siswa. Artinya yang tidak memenuhi standar kelulusan, ya tidak lulus. Silakan mengikuti lagi tahun depan atau melalui ujian paket C.

Standar kelulusan yang diberlakukan pada tahun ini adalah nilai minimal 4,0 dan nilai rata-rata minimal 5,0. Tiga mata pelajaran yang di UN-kan adalah Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Misalnya seorang peserta UN mendapat nilai 4,0 untuk mata pelajaran Matematika, dia akan tetap lulus bila nilai dua mata pelajaran lainnya masing-masing 6,0, sehingga nilai rata-ratanya melebihi 5,0.

Tahun lalu, standar kelulusannya berbeda (lebih ketat) yakni menggunakan nilai minimal 4,25. Bila ada mata pelajaran yang di UN-kan nilainya di bawah itu, maka peserta UN tersebut akan gagal, berapa pun nilai rata-ratanya. Ketika itu, angka kelulusan UN SMU dan setingkat, mencapai 92 persen. Tahun ini, dengan standar kelulusan lebih mudah, diharapkan persentase kelulusan lebih tinggi. Tetapi sebenarnya yang jauh lebih penting adalah meningkatnya kualitas rata-rata pendidikan kita.

Mungkinkah peningkatan kualitas pendidikan nasional dapat dicapai dengan hanya mengacu pada hasil UN? Sejak awal, harian ini berkeyakinan cara itu tidak tepat. Pertama, hanya tiga mata pelajaran yang diujikan secara nasional. Bagaimana dengan mata pelajaran lain. Siswa yang berprestasi di bidang olahraga atau pelajaran lain, silakan gigit jari bila nilai rata-rata UN di bawah 5,0. Tak heran, bila banyak sekolah memutuskan selama setahun hanya mengajarkan tiga mata pelajaran yang akan diUN-kan untuk kelas tiga (SMP dan SMU).

Kedua, standarisasi harus dilakukan bukan hanya pada cara evaluasinya. Apalagi cara evaluasi yang meringkas seluruh mata pelajaran hanya menjadi tiga mata pelajaran yang diujikan. Standarisasi harus dilakukan

mulai dari pengajarnya, fasilitas belajar, kurikulum, alat didik, dan sebagainya. Memang tak mudah, tetapi tunjukkan dulu bahwa pemerintah serius ke arah sana, sebelum memilih jalan pintas lewat UN.

Ketiga, UN memboroskan anggaran negara kalau hanya dipakai untuk menentukan lulus atau tidak. Setidaknya untuk tingkat SMU dan sederajat. Lulusannya harus mengikuti seleksi untuk bisa masuk ke Perguruan Tinggi. Artinya, nilai UN di sini tidak berperan.

Tetapi bisa dimaklumi, secara nasional pemerintah memang membutuhkan instrumen untuk mengukur keberhasilan sistem pendidikan kita. Idealnya, setelah UN dilakukan, ada kajian makro untuk memperbaiki pendidikan kita secara nasional. Bukan hanya men-gubah-ubah standar kelulusan untuk menaikturunkan persentase kelulusan siswa. Atau mengutakatik kurikulum yang nyaris menjadi rutinitas Depdiknas.

Sekali lagi, terlepas prokontra pelaksanaannya, UN tetap dilakukan. Kita berharap pemerintah dengan bantuan aparat mampu menjaga dan menyelenggarakannya dengan baik, sehingga siswa-siswa yang sungguh-sungguh belajar dapat dengan tenang mengikuti UN.\*\*\*

# Hasil Ujian Nasional

Kompas, 21 Juni 2006

**L**uar biasa! Itulah decak kagum atas angka kelulusan ujian nasional sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) tahun 2006.

Pada tahun 2005, untuk Bahasa Inggris, Matematika, dan Bahasa Indonesia tiga mata pelajaran yang diujikan nasional standar kelulusan minimal 4,01, tahun ini 4,26 atau rata-rata 4,50. Rerata persentase kelulusan mencapai hampir 90 persen dari 1.958.746 peserta..

Rinciannya: untuk SMA, angka kelulusan naik dari 80,76 persen tahun 2005 menjadi 92,50 persen; madrasah aliyah dari 80,73 persen menjadi 90,82 persen; SMK dari 78,29 persen menjadi 91,00 persen. Kehadiran pengawas independen barangkali memperkuat harapan hasilnya tidak disusul kasus manipulasi dan kebocoran.

Sampai menjelang penyelenggaraan ujian nasional (UN) SMP, SMA/SMK, bahkan pengumuman UN SMA/SMK, UN mengundang polemik. Di ruangan ini, sebulan menjelang pelaksanaan UN 2006, kita sampaikan penghargaan sikap tegar Mendiknas.

Kita hormati masukan kritis masyarakat terutama menyangkut disparitas sekolah. Argumentasi masing-masing masuk akal. Namun, tingginya angka kelulusan tahun ini perlu kita tanggapi positif. Angka itu menyodorkan bukti anak bangsa ini anak-anak pemilik masa depan Indonesia mampu berprestasi. Usaha keras dan disiplin ketat membuahkan hasil. Usaha keras lulus UN dengan menambah program remedial, kursus kilat, bahkan program drilling sekalipun perlu dihargai.

Kita apresiasi keberhasilan sejumlah kecil remaja Indonesia yang memperoleh penghargaan internasional di bidang ilmu-ilmu murni. Mereka juara. Mereka dipompa dan dimotivasi oleh orang-orang postmo semacam Prof Yohanes Surya.

Pendeknya kita bisa! Tidaklah benar cibiran Gunnar Myrdal bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa lemah. Yang perlu ditindaklanjuti, bagaimana

keunggulan-keunggulan ini diberi tempat dan dibiarkan berkembang, tidak dijadikan "kambing hitam" untuk dalih kegagalan.

Kultur kita yang cenderung menyalahkan, cenderung mencari "kambing hitam", menafikan terobosan. Ketika kita bicara *ngalor-ngidul* soal UN, tidak ketemu antara kebijakan Mendiknas dan keinginan masyarakat, terobosan alternatif sulit dilakukan. Yang terjadi adalah urusan kalah atau menang.

Dalam kasus UN, di tengah kritik merosotnya mutu sekolah dan lulusannya, kebijakan ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari mencari terobosan. UN menjadi salah satu pintu masuk perbaikan mutu. UN hakikatnya adalah tolok ukur daya serap, sudah sepatutnya untuk masuk perguruan tinggi perlu testing masuk sendiri.

Memperkecil jurang disparitas adalah keharusan, yang perlu diminimalkan bertahap. Kondisi kemajemukan menjadi dasar perlunya standardisasi minimum, kemampuan minimal yang perlu dimiliki di setiap jenjang sekolah, di antaranya lewat UN.

Hasil UN SMA/SMK 2006 meneguhkan keyakinan buah kerja keras, kesempatan berterima kasih untuk para pendidik, sekaligus mengkaji perlu tidaknya bicara *ngalor-ngidul* soal UN.\*\*\*

# Sesudah Ujian Nasional

Kompas, 18 April 2007

**U**jian nasional atau UN hingga tahun 2007 ini masih jadi polemik. Namun, UN jalan terus. Pada 2008 akan diterapkan di tingkat sekolah dasar.

Tanggal 17-19 April 2007 UN diselenggarakan untuk tingkat SMA dan sederajat, 24-26 April untuk SMP dan sederajat. Kedua UN itu diperkirakan diikuti sekitar 5 juta siswa, di antaranya sekitar 2 juta siswa tingkat lanjutan atas yang seluruhnya tersebar di 53.000 sekolah.

Nilai rata-rata standar kelulusan beberapa mata pelajaran yang di-UN-kan naik dari 4,5 tahun lalu menjadi 5,0. Dengan standar 4,5, baik untuk peserta tingkat menengah atas maupun menengah pertama, persentase kelulusan UN tercapai di atas 92 persen.

Kenyataan itu menjadi dasar menaikkan standar nilai kelulusan dengan asumsi timbal balik antara persentase kelulusan dan tingkat kesulitan soal. Arahnya secara bertahap mutu hasil didik diperbaiki. Hasil UN menjadi tolok ukur prestasi sekolah.

Yang terlihat kemudian, dari UN SMA tahun 2006, peringkat pertama jurusan IPA dan IPS dicapai SMA Negeri I Bangli, Jawa Timur. Untuk IPA, misalnya, nilai rata-rata Bahasa Indonesia 9,46, Bahasa Inggris 9,71, Matematika 9,71. Stigma bahwa sekolah-sekolah berprestasi selalu berada di kota-kota besar runtuh.

Apa artinya? Terlepas dari kiat-kiat lolos dengan memacu mata pelajaran yang di-UN-kan, UN bisa menjadi salah satu cara menaikkan mutu. Mengujikan beberapa mata pelajaran secara nasional sesuai pula dengan prinsip perlunya standardisasi minimum. Yang di-UN-kan adalah mata-mata pelajaran yang memberi motivasi belajar (incentive learning) sesuai dengan jurusan setiap peserta.

Yang perlu dilakukan adalah perbaikan tata cara pelaksanaan UN. Tidak hanya masalah kebocoran soal yang sebaiknya jadi urusan polisi,

pelaksanaan UN dan proses penilaian, tetapi juga kesamaan pendapat tentang makna UN sebagai salah satu tolok ukur hasil praksis pendidikan.

Benar UN bukan satu-satunya alat ukur. Benar UN masih memerlukan perbaikan sana-sini, selain proses pelaksanaannya juga perbaikan sarana infrastruktur. Namun, dengan prinsip proses belajar harus dievaluasi dengan semangat *incentive learning* dan diperoleh hasil minimal yang standar, UN rasanya adalah pilihan terbaik kita saat ini.

Yang perlu adalah bagaimana setelah UN menjadi keputusan politis, salah satu cara menaikkan mutu perlu dibarengi dengan perbaikan sarana. Sarana pendidikan meliputi gedung, buku, dan guru. Semangat *make the best* sesudah (pasca) UN hendaknya jadi pintu masuk bersama.

Semangat "sesudah UN" tidak lagi memolemikkan UN demi kepentingan politis, melainkan demi mempersiapkan masa depan generasi penerus bangsa ini. Tanpa mengingkari semangat pedagogis anak didik sebagai pusat orientasi, kita pusatkan perhatian pada perbaikan sarana pendidikan, di antaranya realisasi anggaran pendidikan dalam APBN minimal 20 persen.\*\*\*

# Ekses Ujian Nasional

Jurnal Nasional, 20 April 2007

**M**asalah pendidikan tidak pernah sepi dari perhatian masyarakat. Bukan karena kini orang sedang sibuk dengan urusan Ujian Nasional (UN) yang masih ramai didiskusikan tentang validitas dari kebijakan itu. Atau bukan karena dua hari lalu presiden membuka simposium pendidikan dan ketenagakerjaan yang diselenggarakan beberapa organisasi kemahasiswaan, di Istana Negara. Pendidikan adalah urusan kita semua, urusan seluruh masyarakat, karena kita semua, urusan seluruh masyarakat, karena kita semua, saudara, teman, tetangga, dan handai taulan yang terus berurusan dengan pendidikan.

Pendidikan adalah upaya pembebasan manusia dari kebodohan. Dan kebodohan adalah akar dari segala masalah sosial suatu negara. Oleh karena itu, pendidikan mutlak penting menjadi perhatian semua orang.

Secara ofisial, pendidikan adalah urusan negara karena negara merdeka dibentuk, seperti tertera dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam sebuah pasalnya pun, Undang Undang Dasar 1945 (hasil amandemen 2002) menyebut nilai alokasi anggaran negara yang harus didedikasikan. Namun angka itu adalah angka ideal yang hanya bisa dicapai melewati suatu proses panjang perencanaan dan penganggaran, karena akan menyangkut banyak aspek.

Kini kita memang sedang diramaikan oleh ekses dari UN, yaitu berupa kebocoran soal di sana sini, perilaku oknum pendidikan yang tidak semestinya, dugaan pengantrolan nilai dan sebagainya. Tetapi dampak seperti itu bukan hanya disebabkan karena ujian sekolah kini ditempuh dengan sistem UN. Sistem apa pun yang diterapkan, baik rayon, lokal, maupun otonomi sekolah, dampak seperti itu tetap akan muncul. Kecurangan, penyimpangan, manipulasi, dan sejenisnya tidak disebabkan oleh sistem yang diterapkan, tetapi oleh moralitas para pelakunya, dalam hal ini para birokrat dan pendidik.

Sebagai sebuah negara kesatuan, standardisasi kualitas lulusan pendidikan secara nasional sangat diperlukan. Kini adalah zaman yang mensyaratkan

*quality assurance*. Apalagi jika kita lihat persaingan global yang mau tidak mau, sebagai anggota masyarakat dunia, kita harus masuk kedalamnya, segalanya ada parameternya.

Hal ini bukan berarti kita “mengindustrikan” manusia dengan standarisasi atau target kualitas produk tertentu, sebab manusia bukanlah mesin atau robot. Tetapi ada hal-hal yang memang harus terukur secara nasional agar kemajuan seluruh daerah bisa disepadankan. Memang pada awalnya nampak berat, karena ada daerah yang belum siap atau seolah belum siap. Tetapi kapan dimulai jika tidak sekarang.\*\*\*

# Saran Solusi Kemelut UN

Kompas, 30 Juni 2006

Sudah diduga, pengumuman kedua ujian nasional atau UN tingkat sekolah menengah diperdebatkan, termasuk kemungkinan kebocoran dan manipulasi. Dalam Raker Mendiknas-Komisi X DPR, Rabu (28/6), Mendiknas tetap menolak UN ulangan. Untuk tingkat menengah atas (SMA/MA/SMK), Menteri menawarkan pengganti ujian kesetaraan Paket C, sementara keinginan masyarakat agar ada UN ulangan terus mengalir.

Hakikat UN sebagai salah satu bentuk evaluasi belajar seharusnya tidak menjadi penentu kelulusan. Evaluasi hasil belajar dilakukan terus-menerus selama proses belajar-mengajar tiga tahun berjalan.

Penetapan angka minimal kelulusan tiga mata pelajaran untuk UN 2006 bisa diterima sejauh dipakai I sebagai sarana menetapkan standar minimum. Angka itu dikonversi dengan nilai yang diperoleh selama proses belajar-mengajar, lewat ulangan harian, ujian sekolah, ujian bersama, dan lain-lain.

Sebuah tes seperti halnya UN adalah moment opname, potret sesaat. Karena itu, masuk akal kalau hasil UN dikonversi dengan hasil tes berulang-ulang sebelumnya. Karena UN ditetapkan sebagai syarat keberhasilan, ada yang menyikapinya dengan "tim sukses sekolah" sebelum kedua UN. Naiknya persentase kelulusan kedua UN 2006 membenarkan dugaan di atas.

Keputusan adanya satu standar minimal ketiga mata pelajaran secara nasional bisa diterima. Banyak sekolah diselenggarakan tidak sesuai dengan standar, menyangkut sarana maupun prasarana, yang pelan-pelan diperbaiki lewat akreditasi sekolah. UN merupakan sarana komplementer mengukur daya serap.

Bagaimana dengan program Paket C? Sasaran Paket C terutama bukan untuk mereka yang berusia sekolah (di bawah 19 tahun), tetapi terutama untuk memperoleh pengakuan formal setelah mengikuti sekian tahap proses pembelajaran.

Menempatkan lulusan Paket C ikut tes masuk ke pendidikan tinggi merupakan pilihan terbaik dari yang terburuk. Cara ini memang tidak ideal, keluar dari maksud awal kebijakan Paket C, juga untuk Paket B setara SMP maupun Paket A setara SD.

Itulah pilihan terbaik, pilihan "jalan tengah" di tengah upaya mengatasi kemelut perbincangan dari tahun ke tahun, dan selalu berakhir dengan ujian nasional yang diikuti dengan perdebatan.

Semua perlu ditata kembali pada relnya. Berpikir jernih dan tidak mau menang sendiri. Mereka yang lulus Paket C diberi hak memperoleh ikut tes masuk perguruan tinggi tanpa mengurangi persyaratan lain di luar syarat kelulusan. Persoalan yang menyangkut manipulasi dan pembocoran soal serahkan masalahnya kepada aparat polisi.

Kita hentikan bicara yang satu ngalor, satunya lagi ngidul tentang UN. Yang terombang-ambing justru peserta didik anak-anak kita yang seharusnya jadi subyek dan pusat segala kebijakan praksis pendidikan. Masing-masing pihak perlu menarik diri, tidak bersemangat sama-sama buntung, tetapi *win-win solution* (sama-sama menang)!\*\*\*

# UN dan Pembentukan Manajemen Sekolah

Harian Terbit, 24 April 2007

Ujian nasional SLA baru saja berakhir dan ujian nasional SLTP dimulai hari ini. Kita ternyata masih prihatin dengan mutu pendidikan kita karena standar kelulusan masih dengan nilai sekitar 4,2-4,5. Kita prihatin karena sejak tahun 1990-an daya serap murid pada pelajaran nyaris tidak beranjak dari 32-37 persen. Jika sudah membaik tentu nilai kelulusan seharusnya minimal 6. Faktanya tahun lalu dengan standar 4,5 saja Depdiknas menuai banyak protes, termasuk dari guru-gurunya.

Satu hal lagi yang memprihatinkan adalah tujuan dasar pendidikan yang makin terabaikan karena moralitas bangsa ini amat rendah, terbukti dengan julukan teganya bangsa lain menjuluki negara ini sebagai negeri terkorup dan terporno di dunia. Di sisi banyak hal di negeri ini yang salah urus dan salah kelola sehingga keterpurukan bangsa ini tak kunjung terhentikan.

Ironis memang bahwa kian banyak orang yang terpelajar, kok kehidupan malah serba sulit dan berbiaya tinggi. Jika benar pendidikan menjadi wahana untuk meninggikan harkat dan martabat manusia sehingga berbudi pekerti luhur, tinggi tepo seliro dan rasa kebangsaannya, mestinya jagat pendidikanlah yang patut diharap. Namun kita saat ini hanya menjumpai sekolah tempat pembelajaran.

Kita tidak tahu sejak kapan orientasi pendidikan ini bergeser. Buntut yang tidak enak adalah mahalnnya bisa bersekolah. Dan yang lebih mengherankan ujian bulan April tapi pelajar masih harus membayar sampai Juli atau habis tahun ajarannya.

Mungkin ada sekolah yang bijak dan hanya mengutip SPP sampai April, walau ini tentu dianggap aneh. Kenapa di dekade awal 1970-1980-an anak SLTA bisa cukup membayar 10 bulan, dan bagi anak miskin masih menerima korting lagi, dan sekarang tidak bisa?

Kita berharap pemerintah membenahi masalah ini sebab manajemen

keuangan sekolah kita tak pernah dibenahi. Sebab, di Jembrana Bali malah bebas biaya pendidikan sudah sampai tingkat SLTA, dan ini terjadi setelah ada pembenahan dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Satu tahun mereka bisa menghemat biaya sampai Rp5 miliar dan itu dialihkan untuk membebaskan SPP. Dan satu hal yang pantas dicatat adalah adanya kemauan semua unsur pendidikan untuk berusaha tertib, jujur, dan lurus menjadi insan pendidik yang mengawal nilai-nilai luhur.

Saat ini kita melihat pendapat para guru lebih dari lumayan. Bulan ini ada ada rapel kesra hingga sekitar Rp 4,6 juta unjuk guru SD. Mestinya kesejahteraan yang kain baik menjadi pemicu balik untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi orangtua murid. Dan kita juga patut bertanya pada Depdiknas apakah kurikulum pendidikannya tidak bisa dijangkau rampung oleh guru sehingga para guru harus mengadakan les, bimbingan belajar, dan kursus?

Kita tidak tahu berapa seharusnya penghasilan para guru yang ideal, namun mata rantai yang menimbulkan biaya tinggi seharusnya dipangkas. Setidaknya Depdiknas harus ada kemauan keras untuk meluruskan arah pendidikan, menertibkan pelaksanaan dan pengelolaan manajemen keuangan sekolah, dan menjaga mutu secara benar. Dari sekarang, justru agar kita tidak saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab.\*\*\*

# Kualitas Pendidikan Nasional

Republika, 16 April 2007

**B**agaimanakah cara mengukur tingkat keberhasilan pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah kita? Salah satu caranya tentu saja dengan ujian nasional. Untuk tingkat SMA dan sederajat, ujian nasional tersebut diselenggarakan mulai besok hingga 19 April 2007. Untuk SMP dan setingkat pada 24-26 April 2007.

Materi ujian yang diujikan adalah bahasa Indonesia dan Inggris, ditambah matematika untuk siswa SMA jurusan IPA atau ekonomi untuk jurusan IPS. Sedangkan untuk siswa SMA jurusan bahasa, mata pelajaran yang diujikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Untuk siswa SMK, mata pelajaran yang diujikan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, dan kompetensi keahlian. Bagi siswa SMP/MTs, mata pelajaran yang diujikan meliputi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika.

Ujian nasional tahun ini akan diikuti sekitar lima juta siswa/siswi. Perinciannya: sebanyak 2.075.800 siswa setingkat SMA dan 3.180.000 siswa setingkat SMP. Jumlah itu tersebar di 53 ribu sekolah di 33 provinsi.

Ada perbedaan tentang standar nilai rata-rata kelulusan peserta ujian nasional kali ini dibandingkan dengan tahun lalu. Pemerintah, melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), menaikkan standar nilai rata-rata kelulusan dari 4,5 menjadi 5,0. Standar ini sebenarnya masih lebih rendah dibandingkan dua negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura, yang mematok angka rata-rata di atas angka 6.

Tahun lalu dengan standar 4,5, dari 3.008.938 siswa setingkat SMP yang lulus 92,03 persen. Sedangkan setingkat SMA, yang lulus 92,50 persen dari total siswa 2.075.000. Dari mereka yang kecewa karena gagal lulus ujian ini kemudian ada yang berunjuk rasa. Ada yang menuntut ujian ulang-an, dan bahkan ada yang meminta agar ujian nasional ini dibubarkan saja karena dianggap bukan menjadi ukuran keberhasilan suatu pendidikan.

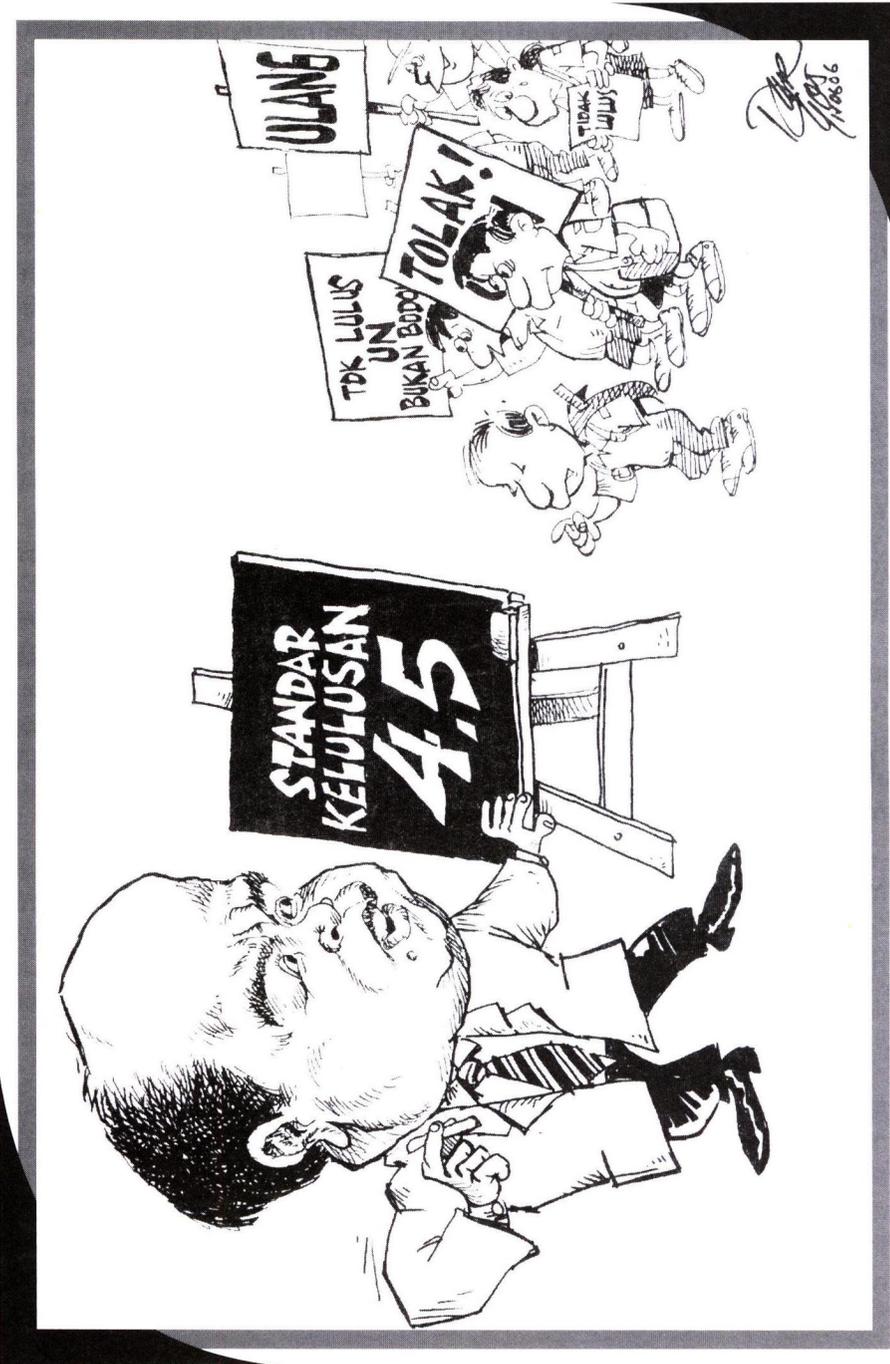
Kita sepakat bahwa ujian nasional atau tepatnya lulus ujian nasional bukan satu-satunya yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan pendidikan nasional kita. Lulus ujian nasional juga bukan jaminan seorang siswa/siswi akan berhasil menjadi 'orang' di kelak kemudian hari. Banyak 'orang besar', entah itu pengusaha, sastrawan/budayawan, politisi, dan sebagainya yang bahkan tidak lulus ujian ketika bersekolah.

Namun, kita juga tidak setuju bila ujian nasional ditiada-kan/dibubarkan. Dengan segala plus-minusnya, ujian nasional masih menjadi barometer satu-satunya keberhasilan pendidikan nasional kita. Bahkan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia kita ke depan, angka rata-rata standar kelulusan harus kita tingkatkan dari tahun ke tahun.

Bayangkan bila tidak ada ujian nasional, bagaimana kita dapat mengukur keberhasilan sekolah siswa/siswi kita. Tentu saja yang perlu kita ingatkan, lulus ujian nasional bukanlah segalanya. Ia bukan tujuan utama. Ia hanyalah sebuah alat ukur untuk mengetahui kualitas pendidikan kita. Karena itu, justru untuk menjaga kualitas itulah ujian nasional harus ditempuh dengan cara-cara yang berkualitas pula.

Sejumlah kasus yang muncul pada setiap ujian nasional pada masa-masa lalu harus kita minimalisasi atau bahkan kita hilangkan sama sekali. Kasus-kasus itu antara lain guru atau oknum-oknum tertentu yang membocorkan soal-soal ujian kepada siswa. Atau siswa yang menyontek jawaban dari temannya dan sebagainya dan sebagainya.

Sekali lagi, ujian nasional hanyalah alat ukur kualitas pendidikan nasional kita. Agar ujian nasional berkualitas harus pula ditempuh dengan cara-cara yang berkualitas. Segala penyelewengan terhadap penyelenggaraan ujian nasional harus dianggap sebagai kejahatan.\*\*\*



# Pilih Unas atau Sekolah Nonformal

Kedaulatan Rakyat, 9 Agustus 2006

Ujian Nasional (Unas) yang salah satunya dimaksudkan untuk menstandarisasi hasil pendidikan di Indonesia, telah menyita konsentrasi paling tinggi sebagai 'tujuan akhir' pendidikan yang harus dibuktikan dalam nilai standar agar bisa dinyatakan kompeten lulus. Makin tinggi nilai yang diraih, secara sistematis akan diakui makin berhasil dan makin bermutu hasil pendidikan.

Agaknya, kegagalan Unas kini telah menjadi momok tersendiri bagi dunia pendidikan dasar dan menengah di negeri kita ini. Apalagi sudah ada *sounding* standar kelulusan tahun ajaran 2006/2007 ini akan dinaikkan. Prokontra dan kritik tajam tentang Unas dua bulan lalu, masih terngiang di telinga kita tidak menghalangi pemerintah yang tetap bersikeras untuk menyelenggarakan Unas sebagai bagian dari sistem pendidikan kita. Tak mampu melakukan *bargaining position* - sekalipun dengan 'menawar' diselenggarakannya Unas ulangan ~ kini komponen pendidikan bersikap mengikuti arus.

Di bulan awal tahun ajaran baru ini, bahkan sudah muncul fenomena baru yakni mengkultuskan tiga mata pelajaran yang di-Unas-kan. Setidaknya, baik guru/sekolah maupun murid, memberi perhatian dan prioritas lebih terhadap cara mengajar dan cara belajar tiga bidang studi: Bahasa Indonesia, Matematika dan Bahasa Inggris ~ antara lain dengan menambah jam pelajaran serta mengisi jam kosong dengan tiga mata pelajaran (mapel) yang diunaskan.

Ada kesan sulit menempuh jalur pendidikan formal di Indonesia. Memiliki karakter berjenjang, semua serba distandardisasi, dari materi yang disamakan sehingga berkesan statis sampai hasil pendidikan yang diukur dengan nilai. Namun Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah menetapkan 'aturan main' ini di jalur pendidikan formal agar bangsa kita tidak tertinggal dengan bangsa lain. Di tengah mainstream pemikiran dan wacana pendidikan yang didominasi oleh pro-kontra pelaksanaan Unas pada jalur pendidikan formal, sebenarnya Depdiknas telah memberi alternatif pendidikan nonformal yang mempunyai karakteristik lebih luwes karena tidak dibatasi oleh jenjang, berorientasi belajar bersifat

praktis, fleksibel dan dalam jangka pendek bisa dilihat hasilnya dan tidak berorientasi mendapat ijazah.

Pada awalnya, program pembelajaran ini didesain untuk merespons kebutuhan masyarakat yang oleh suatu sebab tidak bisa mengikuti pendidikan formal. Melihat tugas dan fungsi direktorat pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal (dulu, direktorat pendidikan luar sekolah dan pemuda - PLSP) yang ada dalam Depdiknas yakni sebagai institusi yang diberikan tanggungjawab dan kewenangan dalam melakukan pembinaan dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal sesuai Standar Nasional Pendidikan - seharusnya jalur nonformal ini, bisa dijadikan alternatif bagi mereka yang merasa tidak mampu dan tidak setuju dengan pendidikan formal, terutama terkait dengan penyelenggaraan Unas.

Mencoba menyimak proses belajar pada pendidikan nonformal, ternyata cukup inovatif berkat prinsip-prinsip antara lain: (1) Menempatkan warga belajar sebagai subjek yang aktif; (2) Menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan warga belajar; (3) Menggunakan pendekatan kegiatan belajar yang partisipatif sejak proses persiapan dan perencanaan; (4) Pelaksanaan program pembelajaran berlangsung secara berkesinambungan sampai evaluasi kemajuan belajar.

Sasaran pendidikan nonformal (PNF) mencakup semua lapisan masyarakat, tidak terbatas usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi dan tingkat pendidikan sebelumnya. Dengan demikian maka pendidikan nonformal tidak saja bermanfaat bagi mereka yang belum pernah sekolah, putus sekolah, atau mereka yang pernah sekolah tetapi belum mendapat pekerjaan. Pendidikan nonformal bermanfaat pula bagi siapa saja yang masih membutuhkan tambahan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan potensi dirinya dan bersedia untuk mengikuti proses belajar.

Seharusnya keberadaan PNF ini juga mendapat skala prioritas untuk sosialisasi, sehingga masyarakat mendapat gambaran umum fungsi dan manfaat PNF yang juga resmi 'diurus' oleh Depdiknas sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Presiden RI No 9 Tahun 2005. Dengan demikian PNF bisa menjadi alternatif sejak awal bagi kalangan yang merasa tidak (akan) mampu menembus standar kelulusan Unas untuk SMP dan SMA. Sehingga tak ada lagi hujatan pelaksanaan Unas\*\*\*



**Pusat Informasi dan Humas, Departemen Pendidikan Nasional**  
Gedung C, Lt. 4, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Telepon/Fax : (021) 5701088  
Website : <http://www.setjen.diknas.go.id>; E-mail : [pih@diknas.go.id](mailto:pih@diknas.go.id)

ISBN : 978-979-15617-3-0 (jilid lengkap)  
ISBN : 978-979-15617-8-5 (jilid 5)

... penerimaan siswa baru, kekerasan  
... sertifikasi guru, prestasi siswa, keke  
... penerimaan siswa baru, tenaga kependidikan, anggaran  
... kekerasan dalam pendidikan, penerimaan siswa baru  
... kekerasan dikampus, sistim penerimaan si  
... AH, siswa baru, ujian nasional, tenaga kependidikan, A  
... rimaan siswa baru, kekerasan dalam pendidikan, penerimaa  
... stasi siswa, kekerasan dikampus, sistim penerimaan siswa  
... pendidikan, anggaran pendidikan, SERTIFIKASI GURU, pre  
... pendidikan, SERTIFIKASI GURU, prestasi siswa, kekerasan dikampus, sis  
... ru, ujian nasional, tenaga kependidikan, ANGGARAN PENDIDIKAN, sert  
... am pendidikan, ujian nasional, tenaga kependidikan, anggaran pendid  
... erimaan siswa baru, PRESTASI SISWA, kekerasan dalam pendidikan, p  
... tifikasi guru, kekerasan dikampus, sistim penerimaan siswa baru, keke

Perpustakaan  
Jenderal  
37